

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kinerja pada pemerintah daerah memiliki peran penting yaitu untuk mengetahui tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan dari pemerintah daerah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi dalam mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pada pelaksanaan program (Novatiani, 2019). Selain kinerja aspek penting di pemerintah daerah adalah akuntabilitas, menurut Halim (2014 : 83) akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban, menjelaskan kinerja dan tindakan seseorang atau pimpinan pada suatu organisasi. Ray (2012) akuntabilitas adalah salah satu bagian dari tatakelola yang baik.

Hafzhan (2021) menjelaskan bahwa akuntabilitas pada pemerintah daerah dapat mempengaruhi kewajiban pemerintah daerah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan serta kegagalan pada pelaksanaan misi organisasi untuk mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Hal ini menjelaskan bahwa pentingnya suatu tanggung jawab publik untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan (Putra, 2013).

Konsep kinerja dan akuntabilitas itu sendiri sejalan dengan ajaran islam, yaitu terdapat pada Qs. Al-Ahzab ayat 72 dan hadits HR. Tirmidzi yang berbunyi :

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

Artinya :

Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung; tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya (berat), lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. (Qs. Al-Ahzab ayat 72)

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ انْتَمَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

Artinya :

“Tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayaimu dan jangan engkau mengkhianati orang yang mengkhianatimu!” (HR. Tirmidzi)

Kandungan dalam Qs. Al-Ahzab ayat 72 dan hadits HR. Tirmidzi tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT memberikan perintah kepada manusia terlebih dalam hal kepemimpinan untuk menjaga sebuah amanah yang sudah diberikan. Pemimpin yang tidak dapat menjalankan amanah dengan baik akan menimbulkan suatu masalah. Karena pemimpin merupakan orang yang sangat bertanggung jawab dalam menjalankan sebuah aturan organisasi.

Pada penilaian akuntabilitas kinerja pemerintah daerah Kabupaten Bantul tahun 2021, dilihat pada tabel 1.1 sebagai berikut:

AKUNTABILITAS KINERJA PEMDA BANTUL TAHUN

2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Kinerja perencanaan pembangunan daerah meningkat	<p><u>Indikator:</u></p> <p>Indeks perencanaan pembangunan</p> <p><u>Metadata Indikator:</u></p> <p>(60% capaian sasaran pemkot + 20% sasaran pemerintah daerah + 20% capaian program pemerintah daerah) dikali 100</p>	persen	92,2	98.6	106,70

Tabel 1.1

Berdasarkan tabel 1.1, pencapaian target sasaran Bappeda untuk tahun 2021 dari target 92,2% terealisasi 98,6% dengan formula perhitungan 60% capaian sasaran pemkot + 20% sasaran pemerintah daerah + 20% capaian program pemerintah daerah (Bappeda Bantul, 2021).

Peningkatan kinerja dan akuntabilitas pemerintah dapat dikembangkan melalui e-government dengan lebih spesifiknya pada (SIA) Sistem Informasi Akuntansi dan E-government secara luas dapat didefinisikan sebagai penggunaan teknologi digital untuk membantu kegiatan pemerintah, yang

bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi dan penyampaian layanan (Nugraha, 2018). Pengertian lain yang disampaikan oleh Nugraha (2018) E-government adalah suatu proses dari suatu sistem pemerintahan dengan menggunakan ICT (*Information Communication and Technology*) sebagai alat untuk memfasilitasi komunikasi dan proses bisnis antara warga masyarakat, organisasi bisnis dan instansi pemerintah beserta pegawainya. Agar dapat mencapai efisiensi, efektivitas, transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada warganya.

Sementara itu, SIA adalah komponen yang saling berhubungan yang terintegrasi untuk mengumpulkan, menyimpan dan menyebarkan informasi untuk perencanaan, pengendalian, koordinasi, analisis dan pengambilan keputusan (Soudani, 2012). SIA menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi pelaku bisnis, relevan terhadap pengambilan keputusan, serta mudah untuk dimengerti sebagai output yang memenuhi kebutuhan pengguna (Darma dkk, 2020). SIA sangat berperan penting pada organisasi terutama pada pemerintah daerah, SIA dibutuhkan pada pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat (Kwarteng, 2018). Untuk mencapai hasil yang baik antar kegiatan organisasi, maka organisasi perlu mengumpulkan data dari semua kegiatan yang dilakukan oleh organisasi. SIA juga mengintegrasikan baik data keuangan maupun non keuangan yang ada pada organisasi (Kwarteng, 2018). SIA sangat penting untuk semua organisasi (Kwarteng, 2018) dan mungkin setiap organisasi baik profit maupun non profit harus memelihara sistem informasi akuntansi.

Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa SIA berpengaruh terhadap kinerja (Kwarteng, 2018) dan akuntabilitas (Pujiswra, 2014), dari

penelitian-penelitian tersebut masih jarang yang meneliti tentang anteseden dari SIA itu sendiri. Maka dari itu peneliti akan membahas mengenai kualitas SIA terhadap kinerja dan akuntabilitas di pemerintah daerah dimana juga diuji daya adaptasi sebagai anteseden dari SIA.

Gustini (2015) menyarankan agar penelitian selanjutnya meneliti faktor internal yang mempengaruhi sistem informasi akuntansi. Penelitian Kwarteng (2018) menemukan adanya keterkaitan antara budaya organisasi dan keberhasilan sistem informasi akuntansi. Implementasi sistem informasi akuntansi diperlukan penguatan nilai-nilai budaya organisasi yang terkait dengan orientasi pelanggan, fleksibilitas, kualitas dan orientasi kinerja. Manajer harus menciptakan budaya/suasana yang sesuai dengan karakteristik sistem informasi yang diterapkan. Budaya organisasi yaitu parameter penting untuk keberlangsungan hidup dan peningkatan bisnis, cara manajemen yang efektif memperhitungkan tidak hanya dari keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan tahunan bisnis (Kwarteng, 2018).

Berdasarkan latar belakang diatas, mengenai sistem informasi akuntansi, kinerja, akuntabilitas, dan budaya organisasi berupa daya adaptasi pada pemerintah daerah. Maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“ANTESEDEN DAN PENGARUH KUALITAS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI TERHADAP KINERJA DAN AKUNTABILITAS ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH (SURVEI DILINGKUP PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANTUL)”**.

B. Rumusan Masalah Penulisan

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah penulisan, antara lain :

1. Apakah budaya organisasi berupa daya adaptasi berpengaruh terhadap sistem informasi akuntansi di pemerintah daerah?
2. Apakah kualitas sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kinerja di pemerintah daerah?
3. Apakah kualitas sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas di pemerintah daerah?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan latar belakang diatas, maka tujuan penulisan, antara lain :

1. Menguji secara empiris pengaruh budaya organisasi berupa daya adaptasi terhadap sistem informasi akuntansi di organisasi pemerintah daerah.
2. Menguji secara empiris pengaruh kualitas sistem informasi akuntansi terhadap kinerja di pemerintah daerah.
3. Menguji secara empiris pengaruh kualitas sistem informasi akuntansi terhadap akuntabilitas di pemerintah daerah.

D. Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis pada penulisan ini dapat digunakan sebagai teori untuk bagaimana memecahkan suatu masalah yang sedang diteliti, serta pengembang ilmu pengetahuan tentang bagaimana pengaruh kualitas sistem

informasi akuntansi terhadap kinerja dan akuntabilitas organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis pada penelitian ini yaitu digunakan sebagai tolak ukur dan informasi bagaimana pengaruh kualitas sistem informasi akuntansi terhadap kinerja dan akuntabilitas organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.